

Pola Perencanaan Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan Untuk Mendukung Kemandirian Pangan Nagari di Sumatera Barat

Basril Basyar^{1)*}, Fuad Madarisa²⁾, Hery Bachrizal Tanjung³⁾

^{1),2),3)}Prodi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang (bbbasrilbasyar4@gmail.com)

Abstrak

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan dalam bentuk program Nagari/Desa Mandiri Pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Melalui program tersebut, nagari penerima manfaat program mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan nagari. Hasil evaluasi, Program Nagari Mandiri Pangan belum mampu mencapai tujuannya secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya Pola Perencanaan Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan Peternak untuk Mendukung Kemandirian Pangan Hewani Nagari di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Jumlah informan penelitian sebanyak 10 orang informan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di 3 nagari dan 1 kelurahan yang tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif melalui alat analisis sintesis. Hasil dari penelitian ini menemukan pola perencanaan program penyuluhan peternakan yang disusun oleh penyuluh yaitu menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dapat terlaksana dikarenakan adanya kekuatan jaringan antar pelaku disektor peternakan. Sehingga partisipasi mereka dapat menjadi kekuatan dalam menyusun perencanaan penyuluhan peternakan dalam rangka membantu pencapaian ketahanan pangan nagari.

Kata Kunci: penyuluh, perencanaan partisipatif, partisipasi, pembangunan.

Abstract

West Sumatra Provincial Government makes policies in the form of Nagari / Village Mandiri Food to realize food independence. Through the program, the beneficiary of the program gets help according to the needs of nagari. Evaluation results, Nagari Mandiri Food Program has not been able to achieve its goals to the maximum. Based on the problem, the purpose of this study is to identify the Planning Pattern of Extension Planning Based on Farm Based on Farm Based to Support the Self-Self-Food of Nagari Animals in West Sumatra. This research uses qualitative methods. This type of research is case studies. The number of research informants is 10 informants. Research data is proposed using interview, observation and documentation techniques. The research location is located in 3 nagari and 1 village spread across 4 districts in West Sumatra Province. The data analysis technique used in this study is to use qualitative descriptive through synthesis analysis tools. The results of this study found the pattern of planning a farm extension program compiled by the extension, which is using a participatory approach. This participatory approach can be implemented due to the network strength between the actors in the farm sector. So their participation can be a force in preparing the planning of breeding farming in order to help achieve nagari food security.

Keywords: extension, participatory planning, participation, development.

PENDAHULUAN

Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program Nagari Mandiri Pangan semenjak tahun 2017 sampai saat sekarang ini. Tujuan dari programnya yaitu membangun ekonomi masyarakat dan memenuhi pangan masyarakat miskin pada daerah rawan pangan di nagari Sumatera Barat. Jumlah nagari yang mendapatkan program ini sebanyak 74 nagari. Namun, hasil dari pelaksanaan program belum mencapai target capaian dan tujuan program mandiri pangan[1].

Salah satu penyebab hasil program ini belum memenuhi harapan karena masih kurang optimalnya peran penyuluhan pertanian sebagai pendamping untuk mendukung pencapaian tujuan Program Nagari Mandiri Pangan. Mestinya penyuluhan pertanian dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan[2], mengoptimalkan produksi pertanian, transfer pengetahuan dan teknologi kepada petani[3][4]. Selain itu juga dapat mendorong dan menjamin keberlanjutan produksi komoditi pertanian pangan yang dihasilkan oleh petani[5].

Untuk mengoptimalkan peran penyuluhan pertanian/peternakan, dibutuhkan program penyuluhan dari hasil perencanaan program yang disusun dengan model perencanaan partisipatif. Namun demikian, penyuluh mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan partisipasi petani dalam proses perencanaan program penyuluhan[6]. Padahal dalam prosesnya membutuhkan keterlibatan aktif beberapa kelompok kepentingan[7][8] untuk menghasilkan perencanaan program penyuluhan pertanian/peternakan dalam mendukung tercapainya tujuan Program Nagari Mandiri Pangan.

Oleh karena itu, dibutuhkan rekayasa pola perencanaan program penyuluhan pertanian/peternakan yang dapat merumuskan rencana program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Program Nagari Mandiri Pangan. Pola tersebut dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi modal sosial[9][10] yang dimiliki oleh petani/peternak penerima manfaat Program Nagari Mandiri Pangan.

Inovasi tersebut penulis tawarkan berdasarkan penelitian terdahulu yang menemukan bahwasannya bonding social capital dapat mengoptimalkan partisipasi petani dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian. Hasil akhir dari perencanaannya dapat mengakomodir kebutuhan petani/peternak dalam program penyuluhan pertanian[11],[12]. Dimensi jaringan yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk jaringan sosial tanpa mengesampingkan bentuk lain modal sosial seperti trust dan norma. Penelitian ini belum ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya, khusus yang menghasilkan Pola Perencanaan Penyuluhan Peterernakan Berbasis Jaringan Peternek untuk Mendukung Kemandirian Pangan Hewani Nagari di Sumatera Barat.

Tujuan umum penelitian ini menghasilkan Pola Perencanaan Penyuluhan Peterernakan Berbasis Jaringan Peternek untuk Mendukung Kemandirian Pangan Hewani Nagari di Sumatera Barat. Untuk tujuan khusus penelitian ini pada Tahap I: Mendeskripsikan pola perumusan perencanaan program penyuluhan peternakan di lokasi studi kasus. Tahap II: Mengeksplorasi dan mengkuantifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan jaringan peternak sebagai basis perencanaan penyuluhan peternakan. Tahap III: Merumuskan pola perencanaan penyuluhan pertanian berbasis jaringan peternak.

Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada hasil kajian yang merumuskan model perencanaan penyuluhan pertanian berbasis modal sosial dengan memasukkan tiga bentuk modal sosial yang ada dalam kehidupan petani. Penelitian terdahulu menggunakan Umbrella Models untuk meningkatkan kualitas perencanaan program penyuluhan[13].

Model yang dihasilkan nantinya dapat mengembangkan teori *communicative planning* yang dimanfaatkan dalam perencanaan penyuluhan pertanian sub sector peternakan. Selain itu, model tersebut dapat menjadi rujukan oleh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran penyuluhan pertanian untuk membantu tercapainya tujuan program Nagari Mandiri Pangan di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari pengumpulan data kualitatif di tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang ada terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk menjelaskan hubungan variable yang ditemukan dalam data kualitatif [33], [34]. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, karena dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian berbentuk *how* dan *why* serta dapat membantu mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata [35]. Jenis data yang digunakan dikelompokkan berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data digunakan teknik wawancara, kuesioner, FGD, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian sebanyak 10 orang informan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif melalui alat analisis sintesis.

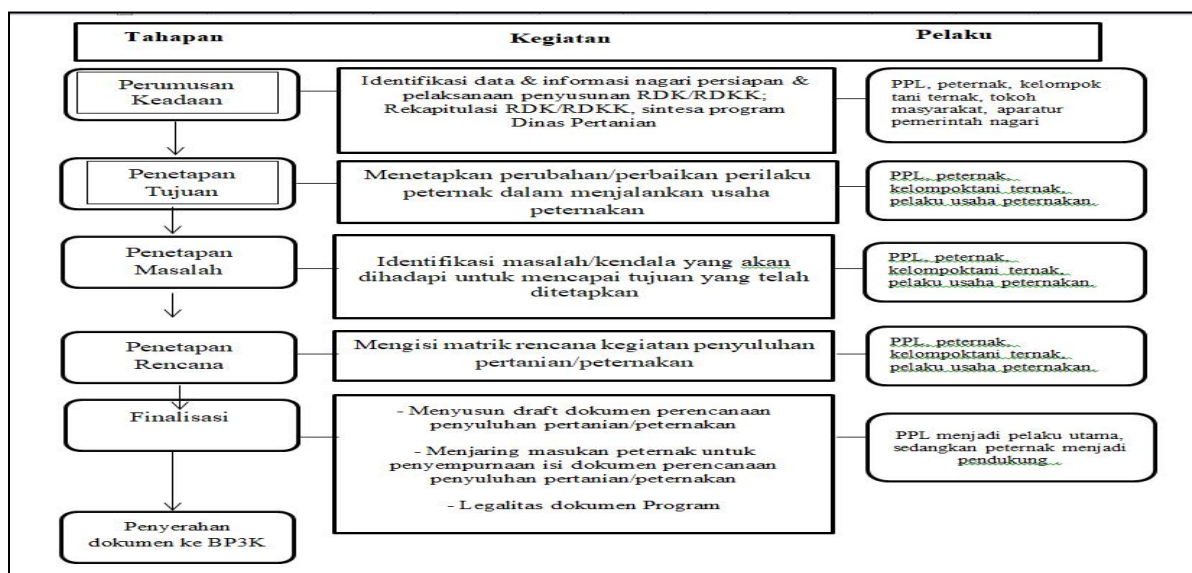
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Menurut Peraturan Menteri Pertanian

Dalam Undang – undang no 16 tahun 2006 tentang tentang system penyuluhan pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan kebijakan tertinggi di level makro yang mengatur perencanaan penyuluhan pertanian nagari. Dalam undang – undang ini dijelaskan bahwa perencanaan program penyuluhan disusun dari wilayah kerja terendah yaitu desa/nagari hingga ketingkat paling tinggi yaitu pemerintah pusat dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Undang-Undang tersebut diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan penyuluhan pertanian haruslah disusun dengan mempertimbangkan sinergitas dan keterpaduan dengan proses perencanaan pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Perencanaan penyuluhan pertanian disusun setiap tahun yang akan dijalankan di tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Hal ini bertujuan agar perencanaan tersebut dapat menjawab seluruh kebutuhan dan permasalahan petani dan pelaku usaha di sektorn pertanian.

Secara ideal proses penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat nagari/desa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Menurut Peraturan Menteri Pertanian

Gambar diatas menjelaskan bagaimana proses perencanaan partisipatif. Petani memiliki ruang untuk terlibat dalam tahapan perencanaan. Petani melakukan analisis terhadap permasalahan mereka lalu mencari solusi untuk mengatasinya. Kegiatan seperti ini juga akan membangun kepercayaan diri pentani dalam mengambil keputusan dan membangun kemandirian.

Ada enam tahap yang dilalui dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian pada level nagari, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan indentifikasi kondisi eksisting. Melalui kegiatan ini dapat diketahui fakta dan data yang jelas mengenai wilayah penyuluhan. Data-data ini didapatkan dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagai alat yang melibatkan masyarakat (petani) desa/nagari supaya bisa saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka terhadap kondisi dan kehidupan desa/nagari, serta membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996). Penyuluh juga bisa menggunakan data sekunder yang telah tersedia di tingkat pemerintah nagari. Data dan informasi yang digali melalui metode tersebut diantaranya adalah potensi desa/nagari, monografi desa/nagari, jenis komoditas unggulan desa/nagari dan tingkat produktivitasnya, keberadaan Kelompok Tani (POKTAN)/Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), keberadaan kelembagaan agribisnis desa, dan menjaring masalahmasalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Dalam prakteknya, sebelum dilaksanakannya PRA, penyuluh bersama-sama petani, pelaku usahatani dan perangkat pemerintah nagari melakukan kegiatan persiapan supaya memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman dalam praktek PRA untuk menggali data dan informasi nagari. Kegiatan terakhir dalam tahapan penetapan keadaan ini adalah penyuluh melakukan sintesis program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perwakilan kelompok tani yang ada di desa/nagari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggabungkan kebutuhan kelompok yang telah terjaring dengan program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas/instansi lingkup pertanian di desa/nagari. Harapan dari kegiatan ini adalah terjadinya sinergitas antara kebijakan, program dan kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian dengan kebutuhan kelompok, sehingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat lebih efektif dan saling mendukung satu sama lainnya.
2. Penetapan Tujuan perencanaan penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaannya, tujuan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyuluh pertanian dengan petani. Fokus utama yang diinginkan dari kegiatan penetapan tujuan yaitu pernyataan tentang perubahan/perbaikan yang hendak dicapai melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Perubahan/perbaikan tersebut lebih ditekankan pada perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki secara individu, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang. Keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan harus dapat diukur, dapat dikerjakan, realistis, dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut (Departemen Pertanian, 2004).
3. Penetapan Masalah yang dihadapi oleh petani. Pada tahapan ini, permasalahan yang dimaksud dapat berupa kendala yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh penyuluh dengan petani. Kendala tersebut dapat saja berasal dari petani itu sendiri yang masih terbatas dalam melakukan adopsi terhadap inovasi/teknologi yang diberikan kepada mereka. Kendalanya juga bias bersumber dari luar seperti keterbatasan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran usahatani, sepertinya keterbatasan ketersediaan pupuk, benih/bibit dan modal. Dikarenai permasalahan yang akan muncul cukup banyak dan tidak mungkin bisa diselesaikan

hanya dengan kegiatan penyuluhan pertanian, maka dalam tahapan ini penyuluh bersama dengan petani menetapkan permasalahan prioritas melalui kegiatan menetapkan kriteria masalah; menyepakati skoring pengkriteriaan; penilaian masalah dgn skoring; menetapkan prioritas masalah

4. Penetapan Rencana Kegiatan. Muatan yang terdapat pada penetapan rencana kegiatan adalah gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Kegiatan yang direncanakan perlu mempertimbangkan kondisi kemampuan petani, ketersediaan sumberdaya pendukung usahatani dan penyuluhan pertanian, kompetensi penyuluh pertanian, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan alokasi dukungan pendanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Pada bahagian ini perlu juga dijelaskan siapa melakukan apa kapan dan bagaimana. Keseluruhan poin-poin yang terdapat pada rencana kegiatan tertuang dalam matriks rencana kegiatan berisikan tentang masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/ frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksanaan dan pihak terkait.
5. Finalisasi Perencanaan Penyuluhan Pertanian/Peternakan Desa/Nagari. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh para penyuluh pertanian di desa/kelurahan/nagari dan dihadiri kepala desa/walinagari, pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa/nagari. Setelah data dan informasi yang didapatkan dirasa telah memenuhi kebutuhan untuk menyusun dokumen perencanaan penyuluhan pertanian, maka penyuluh secara mandiri akan menuliskan keseluruhannya dalam dokumen perencanaan penyuluhan pertanian yang sistematikanya telah ditetapkan oleh dinas/instansi terkait penyuluhan pertanian. Setelah dokumen disempurnakan, maka penyuluh pertanian akan meminta tanda tangan pihak yang terlibat dalam penyusunannya seperti perwakilan dari petani dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan/walinagari. Tahapan terakhir yaitu keenam, dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau BP3K sebagai bahan untuk menyusun perencanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan.

Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian/peternakan tingkat nagari, diharapkan telah selesai disusun pada bulan September tahun berjalan. Penyusunan program penyuluhan dilakukan oleh penyuluh pertanian bersama para pelaku utama (petani) dan pelaku usaha serta organisasi petani secara partisipatif. Pada tahapan pertama sampai dengan kelima seperti yang terlihat pada Gambar 18, PPL bersama-sama petani menjadi pelaku aktif untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan penyuluhan pertanian. Pada tahapan kelima dan enam, petani tidak lagi banyak terlibat, karena tahapan tersebut lebih didominasi oleh PPL.

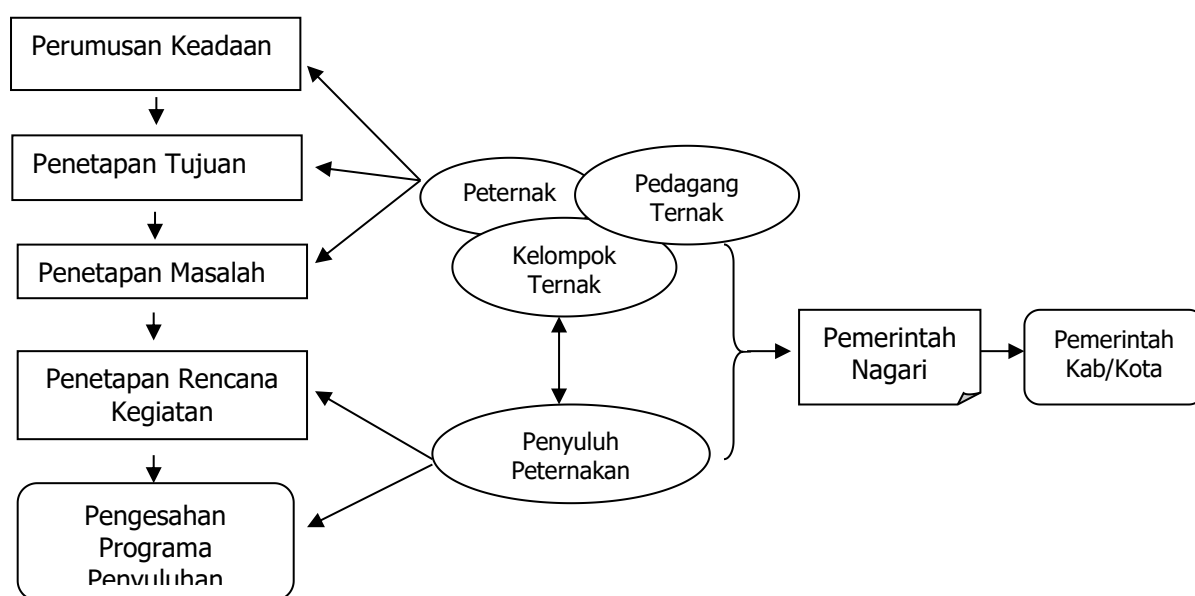
2. Pola Perencanaan Program Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan Peternakan

Untuk mewujudkan kemandirian pangan Nagari, dibutuhkan intervensi banyak pihak. Hal ini dikarenakan banyak aspek yang dapat mempengaruhi untuk dapat terwujudnya kemandirian pangan Nagari. Salah satu aspek penentu adalah kompetensi pelaku utama yaitu petani/peternak yang menjalankan program dan kegiatan kemandirian pangan nagari.

Peningkatan kompetensi sdm peternak dapat dilakukan dengan menjalankan program penyuluhan. Untuk mengefektifkan program penyuluhan peternakan, biasanya penyuluh menggunakan pendekatan kelompok dan terkadang pendekatan individu. Hal ini bertujuan agar kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya, waktu dan tenaga yang tidak banyak.

Agar pelaksanaan penyuluhan pada sub sektor peternakan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur, penyuluh perlu menyusun perencanaan program penyuluhan. Perencanaan program penyuluhan merupakan acuan bagi para penyuluh dalam melaksanakan program dan kegiatan penyuluhan. Dimana dalam pelaksanaannya, dibutuhkan data dan informasi didapatkan dari peternak.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan program penyuluhan peternakan, bersifat data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, keterlibatan peternakan dalam proses penyusunan perencanaan program penyuluhan peternakan sangat dibutuhkan oleh penyuluh. Untuk mengotimalkan keikutsertaan peternakan dalam proses tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengotimalkan potensi modal sosial yang dimiliki oleh peternak. Salah satu bentuk modal sosial yang dimanfaatkan penyuluh yaitu jaringan. Adapun pola perencanaan program penyuluhan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan peternak dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



Gambar 2. Pola Perencanaan Program Penyuluhan Peternakan Berbasis Jaringan Peternak di Lokasi Penelitian

Merujuk pada Gambar 2 di atas, terdapat beberapa tahapan dalam menyusun perencanaan program penyuluhan peternakan. Tahapan tersebut terdiri dari, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan dan pengesahan program penyuluhan peternakan. Dalam tahapan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang membutuhkan keterlibatan peternakan dan pelaku utama lainnya. Adapun tahapan tersebut yaitu perumusan keadaan, penetapan tujuan dan penetapan masalah sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini:

"... Pada saat perencanaan program penyuluhan peternakan disusun, terdapat beberapa tahapan yang membutuhkan keterlibatan peternak sebagai sumber data dan informasi. Adapun tahapan tersebut yaitu perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah..."

Oleh karena itu, seorang penyuluh yang berperan sebagai fasilitator dalam perumusan perencanaan program penyuluhan peternakan perlu menggunakan strategi khusus agar peternak yang ada di daerah kerjanya mau terlibat dalam proses tersebut.

Fakat yang ditemukan di lokasi penelitian, penyuluh memanfaatkan kekuatan jaringan yang dimiliki peternak. Jaringan peternak tersebut dapat mempengaruhi peternak lainnya untuk mau terlibat dalam setiap tahapan perencanaan program penyuluhan peternakan. Jaringan tersebut terbentuk berdasarkan keterkaitan kegiatan usaha peternakan yang dilakukan oleh peternak.

Dalam pelaksanaannya, penyuluh memanfaatkan tokoh-tokoh peternak untuk mau membantu mengumpulkan peternak yang ada di daerah tersebut. Melalui kekuatan jaringan tokoh peternak, maka jumlah partisipan dalam kegiatan perencanaan program penyuluhan dalam memenuhi kuota yang dibutuhkan oleh penyuluh. Jumlah peserta yang cukup, menjadi kekuatan penyuluh dalam menggali data dan informasi terkait dengan perumusan keadaan. Data dan informasi tersebut nantinya menjadi bahan utama dalam menetapkan tujuan, masalah dan merumuskan perencanaan program penyuluhan peternakan.

Pada saat adanya data dan informasi yang bersumber dari peternak dan pelaku utama lainnya, maka program dan kegiatan penyuluhan yang dirumuskan dalam perencanaan program penyuluhan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peternakan. Keuntungan lainnya dari pemanfaatan jaringan yang dimiliki oleh peternak yaitu penyuluh mendapat kemudahan dalam melaksanakan perencanaan program penyuluhan peternakan.

PENUTUP

Pola perencanaan program penyuluhan pertanian sub sektor peternakan yang digunakan oleh penyuluh adalah menggunakan pendekatan partisipatif. Pola ini dapat digunakan karena adanya kekuatan jaringan yang dimiliki oleh para peserta perencanaan. Adanya terbangun jaringan antara penyuluh dengan peternak, masyarakat penerima program dan pemangku kepentingan di nagari, membuat penyuluh dengan mudah menyelenggarakan perencanaan penyuluhan peternakan dengan metode partisipatif. Namun demikian, penyuluh dan peserta perencanaan program penyuluhan peternakan masih tetap merujuk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nagari. Akan tetapi, bentuk partisipasi yang diberikan tidak semuanya berbetuk utuh, sebagian dari mereka hanya memberikan partisipasi dalam bentuk kehadiran. Meskipun demikian, ada juga dari peserta yang memberikan partisipasinya dalam berbagai macam bentuk yaitu waktu, materi dan sumbang pendapat dan pikiran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan karena adanya bantuan dana penelitian melalui program hibah Pascasarjana Unand. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pimpinan Pascasarjana Unand yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk kelancaran kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pangan Sumatera Barat. 2019. Kajian Analisa dan Evaluasi Nagari Mandiri Pangan. Tidak dipublikasikan.
- Sajid Fiaz, S., Noor, A.M., Aldosri, O.F. 2018. *Achieving food security in the Kingdom of Saudi Arabia through innovation: Potential role of agricultural extension. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences* (2018) 17, 365–375.
- Baloch, A.M. & Thapa, G.B. 2018. *The effect of agricultural extension services: Date farmers' case in Balochistan, Pakistan. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, Volume 17, Issue 3, July 2018, Pages 282-289.*

- MarcusTaylor, M. & Bhasme, S. 2018. Model farmers, extension networks and the politics of agricultural knowledge transfer. *Journal of Rural Studies*, Volume 64, Pages 1-10.
- Patcha Sattaka, P., Pattaratuma, S., & Attawipakpaison, G. 2017. Agricultural extension services to foster production sustainability for food and cultural security of glutinous rice farmers in Vietnam. *Kasetsart Journal of Social Sciences* 38 (2017), pp 74-80.
- Reza, M. 2016. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Menara Ilmu*, Vol.X Jilid 1 No.63 Januari 2016.
- Anis, M.S., Effendy, L., Muslihat, J.E . 2014. Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Penyusunan Rencana Defenitif Kelompok/ Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Vol. 9 No.1, Mei 2014, Hal 37-42.
- Brooks, M.P. 2002. *Planning Theory for Practitioners*, American Planning Association, Chicago.
- Egam, P.P & Rengkung, M.M. 2014. Perencanaan Kota: Keberlanjutan *Ethnic Community* Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal. *Media Matrasain* ISSN 1858 1137 *Volume 11, No.3, November 2014*.
- Healey, P. 2006. *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*, 2nded. Palgrave Macmillan. New York.
- Reza, M., Noer, M., Yonariza, Asmawi. 2019. Agricultural Extension Planning Pattern at Level of *Nagari* (Minangkabau Traditional Village) Based on Bonding Capital in Group of Farmers in Lima Puluh Kota District, Indonesia. *International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology*, Vol. 9 (4).
- Reza, M., Noer, M., Yonariza, Asmawi. 2019. Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Penyuluhan*, Vol.15, No.1.
- Arnold, E.M. 2015. Connecting the Dots: Improving Extension Program Planning with Program Umbrella Models. *Journal of Human Sciences and Extension*, Volume 3, Mumber 2.
- Abdullah, S. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di Kelurahan Tobimeita Kecamatan Abeli Kota Kendari. *Etnorefika*, Vol. 6, No.1.
- Ediwiwati, R., Koestiono, D & Setiawan, B. 2015. Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus pada Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Oro Bulu Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan). *Agrise*, Volume XV, No.2.
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. LPP UNS & UNS Press. Surakarta.
- Madarisa, F., Anas, A., Reza, M. Anwar, S. 2018. *Pengantar Ilmu Penyuluhan Pertanian*. Andalas University Press. Padang.
- Scheer, S.D., Cochran, G.R., Harder, A., Place, ick T. 2011. Competency Modeling in Extension Education: Integrating an Academic Extension Education Model with an Extension Human Resource Management Model. *Journal of Agricultural Education*, Volume 52, No.3.
- Abbas, M., Lodhi, T.E., Aujla, K.M., and Saadullah, S. 2009. Agricultural Extension Programs in Punjab, Pakistan. *Pakistan Journal of Life and Social Seinces*, Vol 7 (1):1-10.
- Ragasa, C., Mazunda, J. 2018. The impact of agricultural extension services in the context of a heavily subsidized input system: The case of Malawi. *World Development*, *Volume 105*, May 2018, Pages 25-47.
- Udemezue JC. 2018. Progamme Planning in Extension System, an Effective tool for Rural Development Project in Nigeria. *Modern Concepts & Developments in Agronomy*, Volume 1, Issue 3, pp. 1-16.
- Boone, E., Safrit, D., & Jones, J. 2002. *Developing programs in adult education: A conceptual programming model*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Diaz, J., Gusto, C., & Diehl, D. 2018. Overview of Extension Program Planning Models. Diakses pada 20 Januari 2019 di <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- Masik, A. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.16/No. 3, hlm. 1-23.
- Rustiadi, E., Saefulhakim,S., Panuju, R.D. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka obor Indonesia. Jakarta.
- Reza, M., Noer, M., Yonariza, Asmawi. 2018. Benefits Of Social Ties In Farmer Groups At Agricultural Extension Planning In The District Of Lima Puluh Kota, Indonesia. *International Journal of Agricultural Extension*, Vol. 06, No.1, 17-24.

- Chriest, A., Niles, M. 2018. The role of community social capital for food security following an extreme weather event. *Journal of Rural Studies*, Volume 64, Pages 80-90.
- Inkpen, C.A & Tsang, K.W.E. 2005. Social Capital, Network, and Knowledge Transfer. *The Academy of Management Review*, Vol. 30, No. 1 (Jan., 2005), pp. 146-165.
- Williams, K & Durance, C.J. 2008. Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics. *The Journal of Community Informatics*, Vol 4, No 3.
- Jiang, H & Carroll. 2009. Social Capital, Social Network and Identity Bonds: A Reconceptualization. *C&T'09*, June 25–27, 2009, University Park, Pennsylvania, USA, pp. 51-60.
- Woolcock, M. 2000. Why should we care about social capital ?. *Canberra Bulletin of Public Administrations*, No 98, pp 17-19.
- Stone, W. 2001. Measuring Social Capital. Towards a Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life. *Research Paper* No. 24 Australian Institute of Family Studies. Melbourne. <http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/stone2.html>.
- Tashakkpri, A & Teddlie, C. 2010. *Hand Book Of Mixed Methods in Sosial & Behavioral Research*. Edisi Bahasa Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications
- Yin, R.K. 2013. *Studi Kasus, Desain dan Metode* Cetakan ke-12, Penerjemah Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.